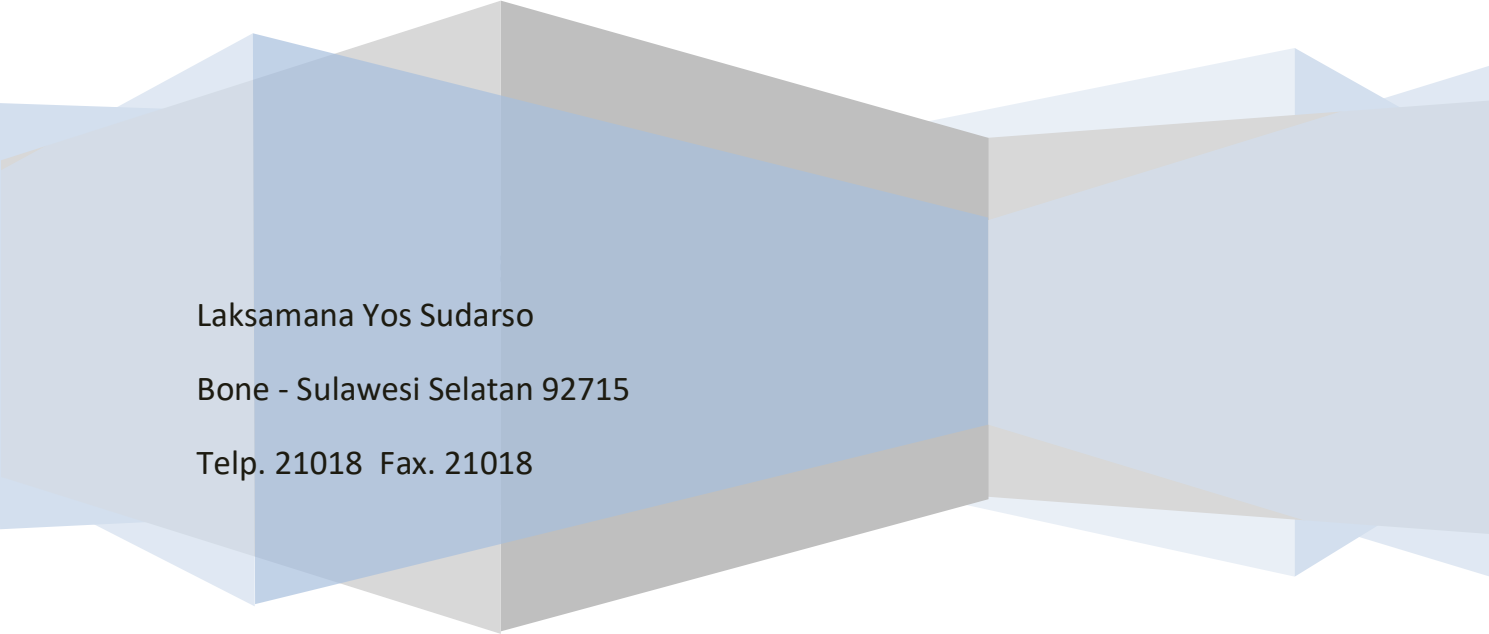


PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

LAPORAN KEUANGAN

309076

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2021



Laksamana Yos Sudarso
Bone - Sulawesi Selatan 92715
Telp. 21018 Fax. 21018



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Laksamana Yos Sudarso
Telp. 21018 Fax. 21018
Bone - Sulawesi Selatan 92715
e-mail : watampone@pta-makassarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Watampone adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Pengadilan Agama Watampone yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Watampone. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Watampone, 6 Juli 2021
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Watampone

H.A.Fajar Sawerilongi, SE.,M.Si.
NIP. 197412142006041002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA.....	x
LAPORAN OPERASIONAL.....	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
A. PENJELASAN UMUM	12
A.1. Dasar Hukum.....	12
A.2.Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	13
A.4.Dasar Pengukuran.....	14
A.6.Kebijakan Akuntansi	14
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	20
B.1 Pendapatan	21
B.1 Belanja Barang.....	23
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	25
c.1 Persediaan	25
C.2 Ekuitas	25
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	29
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	26
D.2 Beban Persediaan	26
D.3 Beban Barang dan Jasa	27

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	28
E.1 Ekuitas Awal	28
E.2 Defisit LO	28
E.3 Transaksi Antar Entitas	28
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	28
E.7 Ekuitas Akhir	28
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	29
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	29
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	29
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	29

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB TA 2021 dan TA 2020.....</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2021.....</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 5. Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 6. Rincian Persediaan</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 7. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020.....</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 9. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020.....</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 10. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 12. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020</i>	<i>30</i>

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watampone

Telp. 0481-21018 Fax. 0481-21018 e-mail : watampone.pta-makassarkota.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone Semester I Tahun 2021 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Watampone, 6 Juli 2021
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Watampone

H.A.Fajar Sawerilongi, SE.,M.Si.
NIP. 197412142006041002



RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone Semester I Tahun 2021 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara Semester I TA. 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp85.705.000,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp184.535.000,00 atau mencapai 46,44 persen.

Realisasi Belanja Negara Semester I TA. 2021 adalah sebesar Rp56.552.000,00 atau mencapai 31,42 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp179.978.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2021.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.898.611,00, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.898.611,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.898.611,00 dan Rp1.898.611,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp85.705.000,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp58.227.245,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp27.477.755,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp27.477.755.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp3.573.856,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp27.477.755, kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(29.153.000,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp1.898.611.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2021 DAN TA 2020

URAIAN	CATATAN	TA 2021			TA 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	184.535.000,00	85.705.000,00	46,44	179.947.000,00	77.957.000,00	43,32
Jumlah Pendapatan		184.535.000,00	85.705.000,00	46,44	179.947.000,00	77.957.000,00	43,32
BELANJA							
1.. Belanja Barang	B.3	179.978.000,00	56.552.000,00	31,42	154.660.000,00	53.180.050,00	34,39
Jumlah Belanja		179.978.000,00	56.552.000,00	31,42	154.660.000,00	53.180.050,00	34,39

NERACA**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE****NERACA****PER 30 Juni 2021 DAN 2020**

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 Juni 2021	30 Desember 2020
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	C		
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C. 2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 3	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)		-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 4	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		-	-
Persediaan	C. 6	1.898.611,00	3.573.856,00
Jumlah Aset Lancar		1.898.611,00	3.573.856,00
Aset Tetap			
Tanah	C. 7	-	-
Peralatan dan Mesin	C. 8	-	-
Gedung dan Bangunan	C. 9	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 10	-	-
Aset Tetap Lainnya	C. 11	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 12	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 13	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 14	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 15	-	-
Tagihan TP/TGR (Netto)		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 16	-	-
Aset Lain-Lain	C. 17	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 18	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		1.898.611,00	3.573.856,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 19	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 20	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C. 21	1.898.611,00	3.573.856,00
JUMLAH EKUITAS		1.898.611,00	3.573.856,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.898.611,00	3.573.856,00

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE LAPORAN OPERASIONAL TA 2021 DAN TA 2020

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		85.705.000	77.957.000
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	85.705.000	77.957.000
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	1.675.245	1.305.600
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	38.960.000	33.020.050
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	-	-
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	17.592.000	20.160.000
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	-	-
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	-
JUMLAH BEBAN		58.227.245	54.485.650
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		27.477.755	23.471.350
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		27.477.755	23.471.350

n

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
30 Juni 2021 DAN 2020

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2021	UNI 2020
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	3.573.856,00	3.046.400
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	27.477.755,00	23.471.350
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI			-
EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3		-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4	-	-
Koreksi lain-lain	E. 5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	(29.153.000,00)	(24.776.950)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.675.245,00)	(1.305.600)
EKUITAS AKHIR	E. 7	1.898.611,00	1.740.800

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Pendekatan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Watampone. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akrual

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Watampone menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Watampone dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Watampone yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Watampone. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	50%

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
SEMESTER I TAHUN 2021 (AUDITED)

	Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
SEMESTER I TAHUN 2021 (AUDITED)

dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
SEMESTER I TAHUN 2021 (AUDITED)

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan

(6) Kewajiban

*Akuntansi
atas
Kewajiban*

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Watampone telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
SEMESTER I TAHUN 2021 (AUDITED)

Uraian	Tahun 2021	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	184.535.000	184.535.000
Jumlah Pendapatan	184.535.000	184.535.000
Belanja		
Belanja Barang	179.978.000	179.978.000
Jumlah Belanja	179.978.000	179.978.000

Realisasi
Pendapatan
Rp85.705.000,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp85.705.000 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp184.535.000.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2021		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	6.700.000,00	2.820.000,00	42,09
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	77.980.000,00	31.165.000,00	39,97
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	99.855.000,00	51.720.000,00	51,80
Jumlah Pendapatan Bruto		184.535.000,00	85.705.000,00	46,44
Pengembalian		-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		184.535.000,00	85.705.000,00	46,44

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp7.748.000,00 atau 9,93 persen dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan dalam Pendapatan Uang Leges dan pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya berupa PNBP Relas Panggilan.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2021 dan TA 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini:

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
SEMESTER I TAHUN 2021 (AUDITED)

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	2.820.000,00	530.000,00	2.290.000,00	432,08
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	31.165.000,00	31.120.000,00	45.000,00	0,14
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	51.720.000,00	46.307.000,00	5.413.000,00	11,69
Jumlah Pendapatan Netto		85.705.000,00	77.957.000,00	7.748.000,00	9,94

Belanja

Realisasi

Belanja

Negara

Rp56.552.000,00

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Watampone pada periode 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp56.552.000,00 atau 31,42% dari anggaran belanja sebesar Rp179.978.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2021 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2021

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
52	Belanja Barang	179.978.000,00	56.552.000,00	31,42
Jumlah Belanja Bruto		179.978.000,00	56.552.000,00	31,42
Pengembalian Belanja		-	-	0,00
Jumlah Belanja Netto		179.978.000,00	56.552.000,00	31,42

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.371.950,00 atau sebesar 6,35% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi di Semester Pertama.

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	-	-	-	#DIV/0!
52	Belanja Barang	56.552.000,00	53.180.050,00	3.371.950,00	6,34
53	Belanja Modal	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Netto		56.552.000,00	53.180.050,00	3.371.950,00	6,34

Belanja

Barang

Rp56.552.000,00

B.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp56.552.000,00 dan Rp53.180.050,00. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp3.371.950,00 atau 6,34% dibandingkan dengan realisasi Belanja

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
SEMESTER I TAHUN 2021 (AUDITED)

Barang periode 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan adanya percepatan realisasi belanja di Semester I.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	-	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11.960.000,00	5.026.000,00	6.934.000,00	137,96
Belanja Barang Persediaan	-	-	-	-
Belanja Jasa	27.000.000,00	27.994.050,00	(994.050,00)	(3,55)
Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	17.592.000,00	20.160.000,00	(2.568.000,00)	(12,74)
Realisasi Belanja Bruto	56.552.000,00	53.180.050,00	3.371.950,00	6,34
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	56.552.000,00	53.180.050,00	3.371.950,00	6,34

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA*Persediaan**Rp.1.898.611,00***c.1 Persediaan**

Nilai Persediaan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.898.611,00 dan Rp1.740.800,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.157,811 atau 0,92%.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Rincian Persediaan*(dalam rupiah)*

No	Uraian	30 Juni 2021	Mutasi	30 Juni 2020
1	Barang Konsumsi	1.898.611,00	(157.811,00)	1.740.800,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah		1.898.611,00	(157.811,00)	1.740.800,00

*Ekuitas**Rp1.898.611,00***C.2 Ekuitas**

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.898.611,00 dan Rp1.740.800,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp85.705.000,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp85.705.000,00 dan Rp77.957.000,00.

Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 7. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
1	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.820.000,00	530.000,00	432,08
2	Pendapatan Ongkos Perkara	31.165.000,00	31.120.000,00	0,14
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	51.720.000,00	46.307.000,00	11,69
Total		85.705.000,00	77.957.000,00	9,94

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.657.245,00 dan Rp1.305.600,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 8. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	1.675.245,00	1.305.600,00	28,31
Total		1.675.245,00	1.305.600,00	28,31

Beban Persediaan
Rp1.657.245,00

D.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp38.960.000,00 dan Rp33.020.050,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian

Beban Barang dan
Jasa
Rp38.960.000,00

Beban Barang dan Jasa untuk Semester I Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Honor Output Kegiatan	400.000,00	550.000,00	(27,27)
2	Beban Barang Non Operasional Lainnya	11.560.000,00	4.476.000,00	158,27
3	Beban Jasa Konsultan	27.000.000,00	27.994.050,00	(3,55)
Total		38.960.000,00	33.020.050,00	17,99

Beban Perjalanan
Dinas Rp39.907.589.
235,00

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17.592.000,00 dan Rp20.160.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester I Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	17.592.000,00	20.160.000,00	(12,74)
Total		17.592.000,00	20.160.000,00	(12,74)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp3.573.856,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.573.856,00 dan Rp3.046.400,00.

E.2 Defisit LO

Defisit LO
Rp27.477.755,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah defisit sebesar Rp27.477.755,00 dan Rp23.471.350,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp(29.153.000,00)
)

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(29.153.000,00) dan Rp(24.776.950,00). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	56.552.000,00
Diterima dari Entitas Lain	(85.705.000,00)
	(29.153.000,00)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar Rp(85.705.000,00) sedangkan DKEL sebesar Rp56.552.000.

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp1.898.611,00

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.898.611,00 dan Rp1.740.800.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 Juni 2021 pada Pengadilan Agama Watampone yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2021.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI setelah tanggal neraca per 30 Juni 2021 pada Pengadilan Agama Watampone yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2021.

F.3. Keadaan Keuangan Perkara per 30 Juni 2021 :

URAIAN	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
Saldo Awal	203.959.000,00			
Penerimaan		275.715.000,00		
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*)			10.750.000,00	
Biaya Panggilan			86.266.000,00	
Biaya Penerjemah			0,00	
Biaya Pemberitahuan			17.944.000,00	
Biaya Sita			0,00	
Biaya Pemeriksaan Setempat			0,00	
Biaya Sumpah			0,00	
Biaya Saksi Ahli			0,00	
Biaya Pengiriman			503.000,00	
Biaya Materai			1.360.000,00	
PNBP Biaya Pendaftaran			6.810.000,00	
PNBP Redaksi			1.340.000,00	
PNBP Lain-lain			4.300.000,00	
Pengembalian Sisa Panjar			82.136.000,00	
Biaya Lain-lain			0,00	
Saldo Akhir				268.265.000,00
Jumlah	203.959.000,00	275.715.000,00	211.409.000,00	268.265.000,00

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

- I Terdapat beberapa rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Watampone :
 1. Semula BRI A/C 00000111-01-001515-30-0 menjadi Rekening Virtual dengan nomor rekening 651543090761000 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
SEMESTER I TAHUN 2021 (AUDITED)

Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

2. BRI A/C 0111-01-002396-30-1 a.n. RPL 055 PA WATAMPONE yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.269.451.000 (Dua ratus Enam puluh Sembilan juta Empat ratus Lima puluh Satu ribu rupiah). Tidak mengalami perubahan

II Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2021 bernomor : DIPA-005.04.2.309076/2021 tanggal 23 Nopember 2020 berjumlah sebesar Rp179.978.000,00 (Seratus Tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus Tujuh puluh Delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Jumlah (Rp)
005.04		
1053.QBA.001	521219	17.500.000,00
1053.QBA.002	521219	146.000,00
	524113	42.432.000,00
1053.QBA.003	521213	400.000,00
	522131	69.100.000,00
1053.QBA.004	524113	50.400.000,00

Satuan Kerja Pengadilan Agama Watampone (309076) mengalami Revisi DIPA sebanyak 2 kali, Revisi I tanggal 11 Februari 2021 dan Revisi ke II tanggal 13 April 2021. Revisi tersebut adalah Revisi RPD halaman III DIPA, tidak mengalami perubahan nilai pagu maupun pergesaran POK.

Berdasarkan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI., Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Tanggal : 2 Desember Tahun 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya maka Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Watampone adalah Sekretaris Pengadilan Agama Watampone yaitu : **H.A.Fajar Sjam Sawerilongi, SE.,M.Si**

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/002/KU.00/SK/I/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatanganan SPM dan Staf Pengelola Keuangan :

Pejabat Pembuat Komitmen : Nurhidayah, S.Ag

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Maftukhah Mustafa, S.Kom

Bendahara : Heriawati, SH



LAMPIRAN

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
UNIT ORGANISASI : 04
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 309076

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
SULAWESI SELATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Tgl. Cetak 17/08/2021 9:11 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,573,856	0
0.0	391111	Ekuitas	0	3,573,856
JUMLAH			3,573,856	3,573,856

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER JUNI 2021
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005	MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 1900	SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : 309076	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Tgl. Cetak 17/08/2021 9:11 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,898,611	0
0.0	313111	Ditagikan ke Entitas Lain	0	56,552,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	85,705,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	3,573,856
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	2,820,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	31,165,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	51,720,000
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	400,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	11,560,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	27,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,592,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,675,245	0
JUMLAH			145,830,856	145,830,856

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER JUNI 2021
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005	MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 1900	SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : 309076	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Tgl. Cetak 17/08/2021 9:11 PM
 lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	123,426,000	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	0	98,830,000
2.0	425232	Estimasi Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan Yang Dialokasikan	6,700,000	0
2.0	425233	Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara Yang Dialokasikan	77,980,000	0
2.0	425239	Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Yang Dialokasikan	99,855,000	0
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	400,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	17,646,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	69,100,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	92,832,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	2,820,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	31,165,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	51,720,000
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	400,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11,560,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	27,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,592,000	0
JUMLAH			364,513,000	364,513,000

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap : LO.SAT
ESELON I	: 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	Tanggal : 17/08/21 9:11 PM
WILAYAH/PROVINSI	: 1900	SULAWESI SELATAN	Halaman : 1
SATUAN KERJA	: 309076	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	Prg ID : lap_lo_satker --
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	85,705,000	77,957,000	7,748,000	9.939
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	85,705,000	77,957,000	7,748,000	9.939
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	85,705,000	77,957,000	7,748,000	9.939
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	1,675,245	1,305,600	369,645	28.312
Beban Barang dan Jasa	38,960,000	33,020,050	5,939,950	17.989
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	17,592,000	20,160,000	(2,568,000)	(12.738)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap : LO.SAT
ESELON I	: 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	Tanggal : 17/08/21 9:11 PM
WILAYAH/PROVINSI	: 1900	SULAWESI SELATAN	Halaman : 2
SATUAN KERJA	: 309076	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	Prg ID : lap_lo_satker --
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	58,227,245	54,485,650	3,741,595	6.867
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	27,477,755	23,471,350	4,006,405	17.069
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	27,477,755	23,471,350	4,006,405	17.069
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	27,477,755	23,471,350	4,006,405	17.069

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 1900 SULAWESI SELATAN
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 18/08/21 8:13 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,573,856	3,046,400	527,456	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	27,477,755	23,471,350	4,006,405	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(29,153,000)	(24,776,950)	(4,376,050)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,675,245)	(1,305,600)	(369,645)	-
EKUITAS AKHIR	1,898,611	1,740,800	157,811	-

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005	MAHKAMAH AGUNG	
UNIT ORGANISASI : 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	
KDUAPPAW : 005041900KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI SELATAN	
KODE SATKER : 309076	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	

Tgl. Cetak 18/08/2021 8:13 AM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	1,898,611	3,573,856	(1,675,245)	(46.88)
JUMLAH ASET LANCAR	1,898,611	3,573,856	(1,675,245)	(46.88)
JUMLAH ASET	1,898,611	3,573,856	(1,675,245)	(46.88)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,898,611	3,573,856	(1,675,245)	(46.88)
JUMLAH EKUITAS	1,898,611	3,573,856	(1,675,245)	(46.88)
JUMLAH EKUITAS	1,898,611	3,573,856	(1,675,245)	(46.88)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,898,611	3,573,856	(1,675,245)	(46.88)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
 ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 309076

Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 18/08/21 8:13 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	184,535,000	85,705,000	98,830,000	46	179,947,000	77,957,000	101,990,000	43
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	184,535,000	85,705,000	98,830,000	46	179,947,000	77,957,000	101,990,000	46
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	179,978,000	56,552,000	123,426,000	31	154,660,000	53,180,050	101,479,950	34
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	179,978,000	56,552,000	123,426,000	31	154,660,000	53,180,050	101,479,950	34
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 1900 SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 17/08/21 9:12 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	6,700,000	2,820,000	0	2,820,000	42.09
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	77,980,000	31,165,000	0	31,165,000	39.97
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	99,855,000	51,720,000	0	51,720,000	51.8
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	184,535,000	85,705,000	0	85,705,000	46.44
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	184,535,000	85,705,000	0	85,705,000	46.44
	JUMLAH PENDAPATAN	184,535,000	85,705,000	0	85,705,000	46.44

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
SATUAN KERJA : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 18/08/21 8:15 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	400,000	400,000	400,000	0	400,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17,646,000	17,646,000	11,560,000	0	11,560,000	65.51	6,086,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	69,100,000	69,100,000	27,000,000	0	27,000,000	39.07	42,100,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	92,832,000	92,832,000	17,592,000	0	17,592,000	18.95	75,240,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	179,978,000	179,978,000	56,552,000	0	56,552,000	31.42	123,426,000
	JUMLAH RUPIAH MURNI	179,978,000	179,978,000	56,552,000	0	56,552,000	31.42	123,426,000
	TOTAL	179,978,000	179,978,000	56,552,000	0	56,552,000	31.42	123,426,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 1900 BA(005) ES1(04) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 18/08/21 8:13 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	400,000	400,000	400,000	0	400,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17,646,000	17,646,000	11,560,000	0	11,560,000	65.51	6,086,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	18,046,000	18,046,000	11,960,000	0	11,960,000	66.28	6,086,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	69,100,000	69,100,000	27,000,000	0	27,000,000	39.07	42,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	69,100,000	69,100,000	27,000,000	0	27,000,000	39.07	42,100,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	92,832,000	92,832,000	17,592,000	0	17,592,000	18.95	75,240,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	92,832,000	92,832,000	17,592,000	0	17,592,000	18.95	75,240,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	179,978,000	179,978,000	56,552,000	0	56,552,000	31.42	123,426,000
	JUMLAH BELANJA	179,978,000	179,978,000	56,552,000	0	56,552,000	31.42	123,426,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
SATUAN KERJA : 309076

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 17/08/21 9:12 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satk

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	179,978,000	179,978,000	56,552,000	0	56,552,000	31.42	123,426,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	179,978,000	179,978,000	56,552,000	0	56,552,000	31.42	123,426,000
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	179,978,000	179,978,000	56,552,000	0	56,552,000	31.42	123,426,000
	JUMLAH	179,978,000	179,978,000	56,552,000	0	56,552,000	31.42	123,426,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 1900 BA(005) ES1(04) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 17/08/21 9:13 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama							
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	400,000	400,000	400,000	0	400,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17,646,000	17,646,000	11,560,000	0	11,560,000	65.51	6,086,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	18,046,000	18,046,000	11,960,000	0	11,960,000	66.28	6,086,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	69,100,000	69,100,000	27,000,000	0	27,000,000	39.07	42,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	69,100,000	69,100,000	27,000,000	0	27,000,000	39.07	42,100,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	92,832,000	92,832,000	17,592,000	0	17,592,000	18.95	75,240,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	92,832,000	92,832,000	17,592,000	0	17,592,000	18.95	75,240,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	179,978,000	179,978,000	56,552,000	0	56,552,000	31.42	123,426,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1053.QBA	179,978,000	179,978,000	56,552,000	0	56,552,000	31.422	123,426,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN1053	179,978,000	179,978,000	56,552,000	0	56,552,000	31.42	123,426,000
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	179,978,000	179,978,000	56,552,000	0	56,552,000	31.42	123,426,000
	JUMLAH BELANJA	179,978,000	179,978,000	56,552,000	0	56,552,000	31.42	123,426,000